

	News Title : Bappebti: Fatwa Haram Kripto Tidak Berdampak Signifikan	
	Media Name : Beritasatu.com	Journalist : Lona Olavia
	Publish Date : 22 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Tirta Karma Sanjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Home > **Ekonomi**

Bappebti: Fatwa Haram *Kripto* Tidak Berdampak Signifikan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 09:04 WIB
Oleh : Lona Olavia / **FMB**



Seminyak, Beritasatu.com – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) menyatakan pihaknya terbuka dengan pihak manapun termasuk lembaga keagamaan mengenai aset *kripto*. Langkah itu menurutnya akan terus diperlukan mengingat munculnya kembali fatwa haram oleh PP Muhammadiyah menyusul fatwa serupa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang sudah diterbitkan terlebih dahulu.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Sanjaya mengatakan, pihaknya akan membuka ruang diskusi dengan Muhammadiyah atas fatwa haram terkait kripto itu.

"Terkait hal lainnya MUI sendiri membuka ruang untuk berdiskusi, karena sampai saat ini belum ada fatwa aset *kripto* itu sendiri haram. Untuk selanjutnya terkait Muhammadiyah kami pun siap untuk buka ruang berdiskusi, termasuk ada ahli fiqih," katanya di T-Hub Bali, Jumat (21/1/2022).

BACA JUGA
Giliran Muhammadiyah Sebut Kripto Haram, Ini Respons Aspakrindo

Meski fatwa *kripto* haram tersebut sudah ada sejak tahun lalu, namun diakuinya fatwa yang merupakan rekomendasi tersebut tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan aset *kripto* baik secara transaksi dan juga penambahan jumlah investor.

Hingga Desember 2021 lalu, pelanggan aktif *kripto* di Indonesia sebanyak 11,2 juta pelaku dan total transaksi sepanjang tahun menembus Rp 859 triliun. Padahal beberapa bulan sebelumnya, jumlah pelanggan aset *kripto* Indonesia di perdagangan baru mencapai 7,5 juta orang akhir tahun lalu. Angkanya melonjak hampir dua kali lipat atau 87,5% dibandingkan catatan 2020, yakni 4 juta orang.

Tak hanya jumlah pelanggan, nilai transaksi *kripto* bahkan meningkat 636,15% menjadi Rp 478,5 triliun hingga Juli 2021. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan 2020 yakni Rp 65 triliun.

BACA JUGA
Kripto Terjunkal, Bitcoin Anjlok 15% dan Ether Minus 20%

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menuturkan, pihaknya fokus untuk memastikan *kripto* itu aman. "Silahkan mereka yang bisa melihat seperti apa. Kami fokus memastikan aset dan komoditas ini benar-benar dari semua sisi, aspek, semua aman. Ini dari sisi bagaimana kita *create* komoditas *kripto* sebagai aset yang bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Bappebti yang merupakan lingkup bagian dari Kementerian Perdagangan saat ini, tambahannya tengah membentuk bursa *kripto*. Pemerintah, jelas dia ingin meyakini nantinya dengan kehadiran Bursa *Kripto* dapat meminimalisasi risiko-risiko atau hal-hal yang bersifat negatif. Pasalnya, semuanya akan terintegrasi dengan satu kesatuan.

"Semua akan melihat ke bursa sebagai instrumen utama. Jadi, tidak ada lagi tuh pedagang nakal, karena ada bursa bersama Bappebti yang akan mengatur. Karena perlindungan konsumen adalah hal yang paling utama," tegas dia.